



Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Program Unggulan di Kabupaten Luwu Utara

Sakral Wijaya Saputra

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pancasakti, Makassar

Korespondensi penulis: sakralwijayasaputra5@gmail.com

Abstract. Regional government policy is a legal product because every village government has this authority. The purpose of this research is to find out the Implementation of Regional Government Policy Regarding Main Programs in North Luwu Regency and what are the supporting and inhibiting factors. The method used in this study was qualitative, using data collection techniques namely observation, interviews and documentation. Based on the results of field research, it was obtained that the Implementation of Regional government's policy Regarding Main Programs in North Luwu Regency was not optimal because it can be seen from several supporting and inhibiting aspects of implementing this superior program. Then the facilities and infrastructure provided by the regional government are still far from the expectations of the community. In addition, there is also the factor of a lack of community involvement in building communication with the North Luwu District Government because the government builds sectoral communication and the community is also tend to be indifferent regarding local government policies.

Keywords: Policy, Regional Government, Main Program

Abstrak. Kebijakan pemerintah daerah merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah daerah memiliki wewenang tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Program Unggulan di Kabupaten Luwu Utara dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diperoleh bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Program Unggulan Kabupaten Luwu Utara belum maksimal karena dapat dilihat dari beberapa aspek pendukung dan penghambat diimplementasikannya program unggulan tersebut. Kemudian sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program tersebut juga masih jauh dari harapan masyarakat. Selain itu juga terdapat faktor kurangnya keterlibatan masyarakat dalam membangun komunikasi dengan pemerintah daerah kabupaten luwu utara karena pemerintah membangun komunikasi yang sektoral dan masyarakat juga cenderung tak acuh terkait kebijakan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Program Unggulan

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya *governance*. Upaya untuk mewujudkan sistem administrasi publik yang demokratis, bersih, dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi masyarakat dan aparatur pemerintah saat ini. Administrator sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan yang dibuatnya. Kecenderungan terjadinya tarik ulur suatu kebijakan mulai dari perumusan, implementasi sampai dengan evaluasi kebijakan merupakan proses yang wajar dan ini merupakan suatu proses yang baik dalam suatu organisasi publik terhadap kebijakan yang akan dibuat.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan.

Received November 10, 2023; Revised Desember 02, 2023; Accepted Desember 30, 2023

*Sakral Wijaya Saputra, sakralwijayasaputra5@gmail.com

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuandan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. Dimana dalam implementasi kebijakan, aktor, organisasi, prosedur dan teknik dipakai secara bersama dan simultan.

Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1999 dengan maksud mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan agar lebih efektif dan efisien, serta memperluas jangkauan dan mutu pelayanan publik. Kabupaten Luwu Utara merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan otonomi daerah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan nasional, memberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 11 tahun 2018 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 6 tahun 2011 juga tertuang suatu tujuan pemerintah daerah yang berbunyi; Pelaksanaan demokrasi menuntut pengelolaan Kabupaten Luwu Utara menjadi tempat yang nyaman dan aman, serta memberikan peluang bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut tata kelola pemerintahan Kabupaten Luwu Utara yang lebih maju dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih bermutu, cepat, mudah, adil, dan tanpa diskriminasi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

BAHAN DAN METODE

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Penulis merasa perlu untuk menggunakan jenis penelitian kualitatif karena menyangkut mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Program Unggulan Kabupaten Luwu Utara. Penelitian dilaksanakan pada 12 Agustus -12 Oktober 2023 di Kabupaten Luwu Utara. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data oleh karena itu, metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Metode observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, di lapangan guna memperoleh data yang berkaitan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Metode Wawancara merupakan proses pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan informan guna memperoleh data yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terkait program unggulan yang di canangkan. Dan metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data melalui arsip, foto, surat, kegiatan kegiatan dan lain sebagainya

yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 2 Kepala desa, 1 Sekretaris Desa, 2 kepala dusun, 4 tokoh masyarakat, dan 1 BPD, dan 5 masyarakat sipil. Dalam pengambilan sumber data, diperoleh dari sumber data primer dan sumber data skunder. Data primer data yang diperoleh secara langsung dari aslinya (informan) yang memiliki informasi atau data yang terkait dengan masalah penelitian melalui sebuah observasi dan proses wawancara dengan subjek penelitian dan data sekunder diperoleh langsung dari sumber kedua objek penelitian (bukan aslinya dan berupa dokumen laporan yang terkait dengan masalah penelitian).

Sedangkan dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Program Unggulan Di Kabupaten Luwu Utara

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan, secara sederhana, adalah proses mengubah peraturan menjadi tindakan. Proses ini kompleks dan sering kali berpolitik karena melibatkan berbagai kepentingan. Tujuan utama implementasi kebijakan adalah mencapai tujuan yang ditetapkan. Ada dua cara umum untuk mengimplementasikan kebijakan publik: langsung melalui program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan. Di Indonesia, model implementasi kebijakan masih mengikuti model *continentalis*. George C. Edward III (dalam Nursalim, 2024) mengemukakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah "direct and indirect impact on implementation". Dalam pendekatannya, terdapat empat variabel yang sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi merupakan variabel yang paling berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif memastikan para pembuat keputusan memahami tugas mereka dengan baik. Informasi harus disampaikan dengan tepat, akurat, dan konsisten kepada semua pihak yang terlibat. Beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan komunikasi antara lain transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi yang baik menghasilkan implementasi yang baik pula, sementara kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi meminimalkan kebingungan di lapangan. Implementasi setiap kebijakan adalah proses yang dinamis dan melibatkan interaksi dari berbagai variabel. Penting untuk menganalisis kondisi-kondisi yang diperlukan agar implementasi berhasil, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang dapat menyebabkan kegagalan implementasi. Untuk memahami implementasi kebijakan dengan lebih baik, diperlukan penggunaan model atau kerangka pemikiran tertentu yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang obyek, situasi, atau proses tersebut, serta hubungan antara komponen-komponen yang terlibat. Namun, penelitian ini akan fokus pada analisis proses implementasi program untuk menentukan tingkat keberhasilannya. Faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi program akan dipelajari dengan cermat.

Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara terkait Program unggulan yang di rencanakan maka ada beberapa program yang di ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni, (1) Bisa Bangkit dalam Pemulihan

Ekonomi, Sosial dan Infrastruktur; (2) Bisa Terkoneksi dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional di Luwu Utara; (3) Bisa Bersaing dalam Peningkatan Daya Saing Daerah; (4) Bisa Maju dalam Pemenuhan Infrastruktur secara Berkelanjutan; dan (5) Bisa Mandiri dalam Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Baru.

Sebagaimana diketahui dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 program pemberdayaan masyarakat desa merupakan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan program sebagai suatu kebijakan, membangun komunikasi antara pemerintah dan Masyarakat, mewujudkan kesejahteraan Masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat, dapat melalui berbagai mekanisme atau tahapan-tahapan dengan menggunakan teori Edwar III yang disebutkan tadi, yang meliputi:

1. Komunikasi

Komunikasi Merupakan Proses terjadinya interaksi Penyampaian pesan melalui mediator. Komunikasi, menurut Edward III, adalah faktor pertama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dia meyakini bahwa komunikasi adalah kunci utama dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi ketika pembuat keputusan memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas mereka. Komunikasi yang baik memastikan bahwa setiap keputusan dan peraturan kebijakan ditransmisikan dengan benar kepada bagian personalia yang sesuai. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan haruslah tepat, akurat, dan konsisten.

Menyangkut bagaimana pola komunikasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang secara jelas dengan isi pesan yang dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau pembuat program. Dalam Komunikasi ini akan dapat dilihat dari berbagai fenomena yang dapat dipahami oleh penulis dilapangan terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam prosesnya. Secara umum sudah dilakukan namun ada beberapa yang tidak sesuai prosedur dan bahkan banyak program yang tidak terlaksanakan jika merujuk pada pola komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan bapak Tandi Ama selaku Kepala Desa Kanandede Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara yang peneliti wawancarai pada tanggal 12 Agustus 2023, Beliau menyatakan bahwa:

“komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait program yang mereka rencanakan tidak begitu optimal, sebab program tersebut tidak sepenuhnya melibatkan Masyarakat dan kepala-kepala desa di dalam perancangannya di luwu utara, bahkan ada beberapa program yang dilaksanakan yang tidak tepat waktu dan tidak prosedural”

Disampaikan juga oleh Kepala Desa Kamiri Raswan yang peneliti wawancarai pada tanggal 13 agustus 2023:

“berbicara mengenai pola komunikasi yang kami lakukan dengan pemerintah disini, tentang program yang akan dilaksanakan, sejauh ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Karna pemerintah cenderung bersikap sektoral terkait pola komunikasi. Bahkan program yang diberikan tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat, hanya sampai kepada wilayah-wilayah tertentu saja.”

2. Sumber Daya

Sumber Daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non fisik dalam proses pelaksanaan kebijakan variabel sumber daya menjelaskan bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan atau sumber daya lainnya yang mendukung proses pelaksanaan kebijakan.

Untuk Melihat bagaimana kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Luwu Utara terkait bagaimana dengan kemampuan para pelaksana kebijakan tersebut sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh salah satu masyarakat sipil di kecamatan rongkong kabupaten Luwu Utara, yaitu bapak Maskun yang peneliti wawancarai pada tanggal 15 agustus 2023, beliau mengatakan bahwa

“kemampuan SDM yang dimiliki oleh para pelaksana program pemberdayaan yang diamanahkan oleh pemerintah kalau dari saya lumayan bagus walaupun disini pendidikan rata-rata hanya SMA sederajat, namun saya tidak memandang dari segi pendidikannya tapi kemampuan dalam melasanakan tugasnya, disini saya melihat sudah ada beberapa program pemberdayaan sudah trealisasi salah satunya program air minum bersih ,program listerik desa, dan program jalan baru. dari situ saya menilai kemampuan SDM yang dimiliki oleh pelaksana kegiatan lumayan bagus walaupun masih ada program pemberdayaan yang belum trealisasi, ini kemungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat misalnya kurangnya keterlibatan masyarakat, masih minimnya sarana prasarana yang dimiliki oleh masyarakat dan tentu tidak terlaksananya program-program unggulan yang di rencanakan pemerintah daerah”

Disampaikan juga oleh salah satu masyarakat sipil lainnya di kecamatan baebunta kabupaten luwu utara, yaitu bapak basoka yang peneliti wawancarai pada tanggal 15 agustus 2023, beliqu menyampaikan bahwa;

“kemampuan SDM yang dimiliki oleh para melaksanakan kegiatan sudah cukup baik, walaupun program-program yang di turunkan pemerintah masih sangat minim dan tidak merata”

Demikian juga disampaikan oleh Kepala Dusun Komba Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Bapak Hasbi yang peneliti wawancarai pada tanggal 17 agustus 2023, beliau mengatakan bahwa;

“SDM kami di desa komba ini sangat terbatas nak, baik ditingkat pembinanya maupun pengelolanya walaupun desa ini memiliki banyak potensi adik desa Komba ini memiliki penghasilan kopi, coklat, padi, jagung, dan lain-lain, namun sampai

sekarang pemerintah tidak mengembangkan potensi-potensi yang ada, baik itu dari segi SDM maupun SDA. saya rasa itu sedikit membantu adik”

3. Disposisi (sikap pelaksana)

Adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana yang memberi hasrat dan *komitmen* yang tinggi untuk mencapai kebijakan. Dalam hal ini tanggapan yang diberikan oleh informan cenderung sama tentang bagaimana para pelaksana membuat kegiatan dan langkah-langkah untuk pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam hal program pemberdayaan masyarakat di Desa Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh salah satu Masyarakat sipil di Masamba bapak Sultan yang peneliti wawancarai pada tanggal 1 september 2023, beliau mengatakan bahwa:

“dalam melakukan kegiatan program pemberdayaan tentu hal ini sesuai dengan harapan masyarakat untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut kegiatan dan apa apa saja yang harus dilakukan ini mengaju pada petunjuk teknis operasional dalam mengadakan program pemberdayaan masyarakat agar dapat dilaksanakan dengan baik”

Disampaikan juga oleh salah satu Tokoh masyarakat bapak rahmat yang ada di kelurahan Salassa Kabupaten Luwu utara yang peneliti wawancarai pada tanggal 2 september 2023, beliau mengatakan bahwa

“Pelaksanaan program unggulan yang di rencanakan pemerintah daerah luwu utara sejauh ini belum menuai harapan dari masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, bahwa pemerintah menurunkan program memang benar, namun dari ke-5 program unggulan yang direncanakan tidak ada satu pun yang dilaksanakan dengan maksimal”

Demikian halnya disampaikan oleh Ketua BPD desa Komba Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara bapak Jamaluddin yang peneliti wawancarai pada tanggal 3 september 2023, beliau menyampaikan bahwa;

“selama berjalannya pemerintahan daerah ini, belum pernah sekalipun kami sebagai masyarakat diajak untuk berdiskusi tentang bagaimana progres program unggulan kabupaten luwu utara”

Sedang Sekretaris Desa Kamiri yang peneliti wawancarai pada tanggal 3 september 2023 beliau menyatakan bahwa

“begitu besar harapan masyarakat untuk dapat terlibat dalam implementasi program unggulan yang direncanakan oleh pemerintah kabupaten luwu utara, namun dari semua program unggulan yang direncanakan hanya beberapa yang kami tahu dilaksanakan, itupun dalam proses pelaksanaannya tidak begitu maksimal”

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat dalam sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Berkaitan dengan pembentukan struktur organisasi dari masing masing

pelaksana pemerintah daerah dalam meningkatkan mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah di luwu utara, peneliti mendapati keterangan dari salah satu Tokoh Masyarakat di Luwu Utara yakni bapak Arifin, yang peneliti wawancarai pada tanggal 4 september 2023, beliau mengatakan bahwa

“berbicara mengenai struktur birokrasi tentu disetiap daerah selalu ada yang namanya struktur birokrasi, kami sebagai Tokoh masyarakat hanya memantau dari luar dan sejauh ini yang kami ketahui bahwa struktur birokrasi yang ada di luwu utara itu seperti pada umumnya. Yakni para pejabat yang mengisi jabatan struktural adalah orang-orang yang menjadi kawan dalam pilkada pemerintahan sekarang”

Demikian juga disampaikan oleh satu masyarakat sipil bapak wirson, Beliau mengatakan bahwa:

“jika berbicara mengenai struktur birokrasi kalau dari saya sudah ada kejelasan strukturnya, kerna berjalannya kegiatan organisasi tentu pasti mempunyai susunan struktur yang jelas dan disetiap daerah itu pasti selalu ada yang namanya struktur daerah, sehingga dalam menjalankan tugas dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan.”

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Daerah Dalam Proses Implementasi Kebijakan Terkait Program Unggulan Di Kabupaten Luwu Utara

Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Luwu Utara terkait program unggulan yang beberapa dilaksanakan adalah Adanya partisipasi oleh masyarakat yang ingin membantu berjalan baiknya pemerintahan daerah kabupaten luwu utara. Sesuai dengan Pernyataan bapak Raswan Selaku Kepala Desa Kamiri yang peneliti wawancarai Pada Tanggal 13 agustus 2023, Beliau menyatakan Bahwa:

“ berbicara motivasi dan komitmen masyarakat disini saya selaku kepala Desa Sering Menyampaikan dorongan dan dukungan terhadap para pelaksana kebijakan dan masyarakat itu sendiri, karena bagi saya motivasi dan komitmen yang tinggi ini merupakan modal dasar akan adanya sebuah perubahan melaksanakan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah.”

Demikian juga disampaikan oleh Sekretarisnya, bahwa;

“harapan saya motivasi dan komitmen ini yang harus kami miliki sebagai aparat Desa guna untuk memberi dorongan dan dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah daerah dalam hal melaksanakan Program unggulan yang direncanakan. Sehingga saya mengarahkan aparat yang ada di desa dapat menjalankan tugas masing-masing sesuai aturan yang berlaku.”

Faktor Pendukung lain dalam Proses Kebijakan Pemerintah daerah dalam melaksanakan program unggulannya adalah seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat bonebone bahwa:

“salah satu faktor pendukungnya adalah banyaknya Potensi yang ada di luwu utara ini yang sangat berkaitan dengan apa yang menjadi program unggulan kabupaten luwu utara”

Demikian juga disampaikan oleh bapak Basoka selaku Tokoh Masyarakat yang Peneliti Wawancarai Pada tanggal 15 agustus 2023

“beliau mengatakan bahwa yang menjadi faktor pendukung jika pemerintah menjalankan program unggulan yang direncanakan, maka saya meyakini bahwa masyarakat akan antusias untuk terlibat dalam pelaksanaannya”

Faktor Penghambat

Hambatan dalam proses Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Untuk mengetahuinya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kamiri yang peneliti wawancarai Pada 2 oktober 2023, beliau mengatakan bahwa:

“yang menjadi faktor penghambatnya program unggulan yang di rencanakan pemerintah adalah tidak adanya keterbukaan oleh pemerintah daerah tentang bagaimana program unggulan tersebut bisa dijalankan. Di lain sisi pemerintah juga masih pilih-pilih dengan siapa dan daerah mana mereka akan bekerjasama, saya berpikir bahwa pemerintah hanya ingin bekerjasama dengan daerah-daerah yang memenangkan mereka saat pilkada yang lalu”

Begitupun yang di tuturkan oleh Bapak Rahim selaku tokoh masyarakat yang ada di Masamba, yang peneliti wawancarai pada tanggal 3 oktober 2023, beliau menyampaikan bahwa;

“tabe adik, bukannya saya mau berkata buruk tentang pemerintah kabupaten luwu utara, hanya saja fakta dilapangan dapat dilihat bahwa pemerintah belum mampu memenuhi apa yang menjadi tujuan yang direncanakan, bahkan sampai saat ini pemerintah masih pilih kasih untuk menurunkan program-program bantuan, bagaimana mungkin program unggulan yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik jika sikap pemerintah masih begitu. Walaupun kami di daerah sini ikut merasakan program pemerintah, namun bagaimana dengan daerah-daerah lainnya yang hanya mendapatkan sepercik bantuan dari pemerintah”

Faktor penghambat lain disampaikan oleh bapak Hasbi Selaku kepala dusun Komba kecamatan Rongkong kabupaten luwu utara yang peneliti wawancarai pada tanggal 5 Oktober 2023, Beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah daerah tidak pernah mengajak kami masyarakat biasa adik untuk terlibat dalam diskusi tentang program yang di rencanakan, mereka pemerintah daerah selalu mengambil sikap sendiri, bahkan kalaupun ada yang di panggil ke kantor daerah untuk membahas program-programnya, yang dipanggil hanya segelintir elite yang ada di daerah ini, yang orang-orang tersebut adalah pendukungnya saat pilkada”.

Kemudian faktor penghambat lain yang disampaikan oleh Bapak amran selaku masyarakat sipil di sukamaju yang peneliti wawancarai pada tanggal 7 Oktober 2023, Beliau mengatakan bahwa:

“yang menjadi faktor penghambat yaitu sikap masyarakat yang tidak peduli terhadap program pemerintah yang tidak terlaksana, mereka terlihat sudah puas dengan program-program yang diterima, yang sebetulnya kebanyakan dari itu bukan dari pemerintah daerah, melainkan pemerintah provinsi yang daerah hanya berperan menjembatani program itu, seperti program jalan trans, listrik dll”

Kemudian faktor penghambat lain yang disampaikan oleh bapak Annas selaku masyarakat

sipil yang peneliti wawancarai pada tanggal 12 oktober 2023, Beliau mengatakan bahwa:

“yang menjadi faktor penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakannya adalah kurangnya tidak adanya pemberitahuan kepada kami tentang program apa yang akan di laksanakan sehingga kami seakan-akan buta terhadap program-program yang akan dan telah diimplementasikan”

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Program Unggulan Di Kabupaten Luwu Utara

Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan memegang peran penting dalam proses kebijakan karena keberhasilan keputusan pembuat kebijakan bergantung pada implementasi yang efektif. Implementasi kebijakan adalah langkah yang terlihat setelah penetapan kebijakan yang sah, yang melibatkan upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau hasil bagi masyarakat. Proses implementasi dimulai setelah penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan program kegiatan, ketersediaan dana untuk pelaksanaan, dan penyaluran dana untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan. Grindle (dalam Syahrudin, 2019 57-58), mengatakan bahwa, Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari masing-masing:

- 1). Dalam proses, dapat dilihat pelaksanaan kebijakan, apakah sesuai yang telah ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2). Tujuan kebijakan yang dicapai. Dimensi ini dapat diukur dengan melihat 2 faktor, yakni;
 - a). Dampak atau efek kepada Masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b). Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran atas perubahan tersebut.

Selanjutnya Indra Kristian (2023: 89-90) menyatakan bahwa: Konsep implementasi kebijakan publik mengacu pada proses memberikan efek praktis kebijakan yang telah diadopsi oleh aparat administratif yang tepat. Implementasi kebijakan publik mengadopsi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.

Kebijakan umumnya mencakup program-program untuk mencapai tujuan tertentu dengan melalui tindakan terarah. Setelah kebijakan dibuat, maka program tersebut harus dilaksanakan oleh para pelaksana atau aparat yang terlibat. Kebijakan yang telah dirumuskan biasanya memiliki tujuan atau target yang ingin dicapai, namun pencapaian target tersebut hanya dapat terwujud jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Implementasi kebijakan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, baik secara individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan.

Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator dengan kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau pelaksana program. Selain itu tak jarang kita mendengar istilah Komunikasi Publik, yaitu Komunikasi yang dilakukan oleh pelayan publik kepada masyarakat. Komunikasi publik sendiri memiliki arti yang penting dan sangat dibutuhkan di negara Indonesia ini. Seperti yang diungkapkan oleh Nyarwi Ahmad (2021, 166-167), bahwa, di negara-negara yang menganut sistem Demokrasi, keterbukaan informasi publik merupakan hal yang sangat penting. Keterbukaan

Informasi Publik ini akan sulit diwujudkan tanpa ada model-model dari praktek-praktek komunikasi publik yang memfasilitasi keterbukaan informasi publik tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa komunikasi yang Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan masyarakat masih jauh dari harapan masyarakat secara umum, walaupun Bupati Luwu Utara mahir dalam berkomunikasi dengan masyarakat, namun komunikasi itu ternyata hanya untuk kepentingan pemilu semata. Dan bahkan komunikasi tersebut terbatas hanya untuk orang-orang tertentu saja.

Dari variabel komunikasi ini peneliti bisa mengambil suatu kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa dapat lihat kejelasan komunikasi yang disampaikan dapat melalui kunjungan desa-desa, mengadakan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah, dan musyawarah di daerah-daerah yang ada di Kabupate Luwu Utara, serta bagaimana pelaksanaannya semua sudah jelas terangkum dan juga informasi yang disampaikan tidak ada tumpang tindih satu sama lain dan semua informasi yang disampaikan sesuai dan sama dengan penjelasan yang diberikan oleh pemberi informasi.

Sumber Daya

Sumber Daya merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur-unsur tertentu dalam kehidupan. Dalam sumber daya ini tidak selalu bersifat fisik tetapi juga bersifat non fisik. Dan dalam proses pelaksanaan variabel sumber daya menjelaskan bagaimana kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan atau sumber daya lainnya yang mendukung proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya menurut George Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumberdaya ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1). Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan antara lain disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, tidak memadai ataupun tidak punya kompetensi dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementator saja tidak cukup, tetapi diperlukan keahlian dan kompetensi dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang dimaksudkan oleh kebijakan itu sendiri.

Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu (a) Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang harus dilaksanakan. (b) Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apa orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan patuh terhadap hukum.

2). Kewenangan; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

3). Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Edwar III juga menegaskan (dalam Chairil Anwar Pohan, 127-129), bahwa, dalam implementasi kebijakan walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila *Implementor* kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

Informan dalam variabel sumber daya ini menyimpulkan bahwa kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara masih sangat terbatas karena belum ada peningkatan program pemberdayaan yang dapat dilihat dari beberapa program pemberdayaan yang ada dan belum sesuai dengan harapan masyarakat seperti program latihan pememabangan usaha tani.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal – hal yang penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah:

- a). *Pengangkatan birokrat*; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakanyang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada keberpihakan terhadap kepentingan warga.
- b). *Insentif*; salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Efektivitas pelaksanaan kebijakan merupakan suatu sikap implementator. Jika implementator setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan kebijakan mengalami banyak masalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti wawancarai terkait dengan variabel disposisi atau sikap pelaksana kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Bahwa para pelaksana kegiatan menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah Daerah. Namun, dalam pelaksanaanya ada beberapa kendala yang terjadi, yakni beberapa program kebijakan yang diturunkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kegiatan yang difokuskan oleh pemerintah daerah tidak menggambarkan prospek program unggulan yang direncanakan, bahkan jauh dari perkiraan.

Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standart Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi adalah melakukan *Standar Operating Procedures* (SOP) dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memicu para pegawai atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan *fragmentasi* adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas – aktivitas pegawai diantarabeberapa unit kerja.

Max Weber (dalam Muhammad Sawir, 2020, 9-10) menggambarkan kriteria-kriteria birokrasi yang ideal sebagai berikut;

- a). Adanya pembagian yang jelas
- b). Hierarki kewenangan yang jelas
- c). Formalisasi yang tinggi
- d). Bersifat tidak pribadi (*impersonal*)
- e). Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai didasarkan atas kemampuan
- f). Jejak karier bagi para pegawai
- g). Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dengan kehidupan pribadi

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti wawancarai bahwa dalam variabel struktur birokrasi sudah terbentuknya organisasi pelaksana kegiatan yaitu kepala daerah dan para aparatnya sebagai pelaksana kegiatan, terdapat kordinasi yang belum optimal antar pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Walaupun Struktur organisasi yang ada di daerah sudah sangat baik namun, kolaborasi pemerintah daerah dan aparaturnya serta tim pelaksana kebijakan belum optimal dalam bekerja terbukti dengan tidak maksimalnya program unggulan yang di rencanakan, lebih ditegaskan lagi oleh beberapa masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti. Semoga kedepannya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tugas masing-masing tidak lari jauh dan tumpang tindih dari tugas yang diberikan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Luwu Utara

Dalam proses menjalankan suatu kebijakan tentu terdapat juga hal yang mendorong atau mendukung agar sesuatu kebijakan tersebut harus terwujud sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Diantaranya ialah motivasi dan komitmen yang tinggi, motivasi dan komitmen

yang cukup tinggi dari aparatur pemerintahan daerah merupakan suatu faktor pendukung dalam mengimplementasikan program-program pemerintah daerah yang secara khususnya dalam kegiatan kebijakan pemerintah daerah untuk merealisasikan program unggulan untuk masyarakat. Selain motivasi dan komitmen dari aparatur Pemerintah daerah, motivasi dan komitmen itu juga dari masyarakat itu sendiri dan juga berperan dalam pengembangan potensi yang ada daerah Kabupaten Luwu Utara.

Dengan motivasi dan komitmen yang dilakukan secara simultan tentu akan berdampak terhadap semangat kerja dari aparat Desa dan masyarakat itu sendiri. Karena semangat kerja merupakan suatu penentu keberhasilan utama pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, disisi lain masyarakat sendiri tidak hanya membutuhkan rancangan dan rencana semata, melainkan juga bagaimana program-program tersebut dapat terealisasikan.

Faktor pendukung lain sehingga program unggulan yang direncanakan pemerintah daerah yaitu mendukungnya sda dan sdm yang ada di luwu utara tersebut, sehingga masyarakat terlihat sangat antusias dan menunggu bagaimana program-program yang di rencanakan dapat terealisasikan.

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah dalam merealisasikan program unggulan yang direncanakan. Berdasarkan hasil peneliti yang peneliti wawancarai secara umum sarana dan prasarana yang digelontorkan oleh pemerintah daerah luwu utara belumlah cukup bahkan untuk sekedar membayangkan luwu utara menjadi daerah yang mandiri dan masyarakatnya sejahtera.

Keterbatasan dari sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk menunjang kemandirian daerah-daerah yang ada di luwu utara menyebabkan merosotnya tingkat kualitas sdm yang ada disana. Namun demikian kekurangan tersebut bukan berarti menjadi salah satu penghalang dalam meningkatkan kegiatan masyarakat guna untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi itu adalah pelajaran untuk calon-calon pemimpin kedepan untuk dapat direalisasikan

Adapun faktor penghambat lain kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perkembangan dan pembangunan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui badan perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, bila suatu masyarakat tidak ikut terlibat dalam perkembangan suatu daerah maka yang terjadi adalah ketidakserasian antara aparatur pemerintah daerah dan masyarakat. Kurangnya keterlibatan masyarakat di daerah ini tidak lain adalah tertutupnya ruang kepada masyarakat secara umum, sebab pemerintah cenderung membangun komunikasi hanya dengan orang-orang tertentu saja.

Selain kurangnya keterlibatan masyarakat ada juga faktor penghambat yang lain yaitu kemalasan dari masyarakat itu sendiri, selain itu tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaksana maupun pengelola dan masyarakat itu sendiri masih sangat terbatas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disajikan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa Proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Program Unggulan Di Kabupaten Luwu Utara, sejauh ini belum terealisasi dengan optimal. Sebab, adanya ketimpangan yang terjadi di daerah tersebut adalah salah satu penyebab dari tidak berjalan baiknya roda pemerintahan di Luwu Utara. Selain itu, peneliti juga meyakini dari hasil wawancara bahwa, pemerintah daerah luwu utara belum mampu merangkul semua masyarakat luwu utara untuk dapat terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berorientasi pemberdayaan. Sehingga kualitas sdm di daerah luwu utara tersebut masih sangat memprihatinkan. Kemudian pola komunikasi antara pemerintah daerah, para pelaksana kebijakan dan masyarakat sangat kurang mantap, sehingga pelaksana kegiatan, masyarakat dan pemda tidak jarang mendapatkan kendala dalam hal komunikasi (misskomunikasi). Kendala yang lain juga dalam pelaksanaan yaitu kemampuan SDM yang dimiliki oleh pelaksana masih sangat terbatas hal ini dapat dilihat masih ada beberapa program pemberdayaan yang belum trealisasi dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat seperti misalnya program pelatihan pengembangan usaha tani, saluran irigasi, rumah tunggu bersalin, program petani muda, dll.

Diharapkan Perlu tingkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat. Selain penyuluhan, pelatihan juga perlu diadakan di daerah-daerah guna meningkatkan SDM dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga luwu utara. Disarankan pula kepada pemerintah daerah luwu utara dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah hendaknya direncanakan secara matang dengan memperhatikan apa yang sebenarnya dibutuhkan dan potensi apa saja yang ada di daerah luwu utara tersebut. Pemerintah daerah juga harus bersikap tegas dengan masyarakat agar mereka ikut dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan supaya tidak terjadi lagi kurangnya keterlibatan dan kemalasan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nursalim. (2024). Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran. *Jurnal Unigal*, 119-120.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Kristian, I. 2023. Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Dialektika*. 21 (2): 89-90.
- Nyarwi, A. (2021). *Dasar Dasar Komunikasi Publik*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Pohang, C.A. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Deepublisher.